

ABSTRAK

Industri penerbangan di Indonesia semakin berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Harga pesawat udara sangatlah mahal sehingga mendorong perusahaan penerbangan mencari pihak penyedia dana guna memberikan fasilitas kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pesawat udara sebagai jaminan dalam perlindungan hukum bagi kreditor yang terlibat dalam perjanjian jaminan pesawat udara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan dikai berdasarkan norma, asas, prinsip dan teori hukum dalam praktik yang berkaitan dengan penelitian ini.. Metode Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal artikel ilmiah atau kepustakaan yang lain serta metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis mendalam dan mendasari perwujudan mengenai peraturan hukum jaminan pesawat udara di Indonesia dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan peraturan perundangan-undnagan di indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang saat ini berlaku tidak mengatur mengenai pengikatan jaminan pesawat udara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Problematika yang terjadi adalah perbedaan pendapat terkait dengan lembaga jaminan apa yang tepat digunakan dalam pengikatan pesawat udara sebagai objek jaminan berdasarkan hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. Ketidakjelasan dan adanya kekosongan hukum dari peraturan pengikatan jaminan pesawat ini juga berpengaruh terhadap kurangnya perlindungan hukum kreditor.

Kata Kunci : Jaminan, Pesawat Udara, Perjanjian, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The aviation industry in Indonesia is increasingly developing the needs of the public. The price of aircraft is very expensive, which encourages airlines to look for funding providers to provide credit facilities. The purpose of this research is to understand and analyze the regulation of aircraft as collateral in legal protection for creditors involved in aircraft collateral agreements. The method used is a normative legal approach, which is based on legislation and analyzed according to norms, principles, and legal theories relevant to this research. The data collection method for this study employs a literature review by examining secondary legal materials, including books, journal articles, and other literature. The data analysis method used is qualitative, involving in-depth analysis that focuses on the implementation of legal regulations regarding aircraft collateral in Indonesia and the legal protection available to the parties involved in the agreements. The research findings express that the current legislation in Indonesia, specifically Law number 1 of 2009 concerning Aviation, which is currently in effect, does not regulate the binding of aircraft as collateral, leading to legal uncertainty. A significant issue that occurs is the differing opinions regarding which collateral institution is appropriate for binding aircraft as collateral objects under the applicable collateral law in Indonesia. The lack of clarity and the legal vacuum in the regulations concerning this collateral binding also negatively impact the legal protection available to creditors.

Keywords: *Collateral, Aircraft, Agreement, Legal Protection*